



**IR 101** merupakan sebuah artikel pengetahuan dasar yang ditulis oleh akademisi/mahasiswa Hubungan Internasional dengan tujuan sebagai landasan pengetahuan mendasar bagi para akademisi/mahasiswa Hubungan Internasional. Maka dari itu, artikel ini tidak dapat dijadikan sumber/sitasi dalam keperluan penelitian akademik.

---

## **IR101: ORGANISASI EKONOMI**

### **Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)**

Elsa Mulyani

*e-Mail:* [elsamulyani03@gmail.com](mailto:elsamulyani03@gmail.com)

#### **Pendahuluan**

OECD berdiri pada tahun 1948 yang terdiri atas 35 negara-negara maju yang memiliki visi untuk menetapkan standar dan mendesain berbagai kebijakan untuk menyempurnakan fungsi ekonomi negara.<sup>1</sup> Adapun negara-negara yang tergabung di dalam OECD mayoritas merupakan negara maju dengan kebijakan-kebijakan ekonomi terbuka, diantaranya adalah Australia, Austria, Amerika Serikat, Belgia, Kanada, Chile, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Hungaria, Inggris, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Korea Selatan, Latvia, Luxemburg, Meksiko, Belanda, Selandia Baru,

---

<sup>1</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "PERUNDINGAN ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT (OECD)". <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-internasional/oecd>, diakses pada 24 September 2022.

Norwegia, Polandia, Portugal, Republik Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki dan Yunani.

OECD merupakan perpanjangan dari organisasi Kerjasama untuk ekonomi Eropa atau biasa yang disebut dengan *Organization for European Economic Co-operation* (OEEC) pada Perang Dunia II.<sup>2</sup>

OECD bukan merupakan organisasi yang hanya tersentralisasi pada perbaikan dan kebijakan ekonomi, namun juga di sektor lain yang berperan penting dalam upaya pembangunan di sebuah negara.<sup>3</sup> OECD memiliki skema kerja sama dengan beberapa negara sebagai mekanisme bagi pemerintah agar dapat membandingkan pengalaman dalam berbagai kebijakan, mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi bersama, serta mengidentifikasi *good practice* dan menetapkan standar global.

## Peran

Bersama dengan pemerintah, pembuat kebijakan, dan warga negara, OECD berupaya menetapkan standar internasional berbasis bukti dan menemukan solusi untuk berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari meningkatkan kinerja ekonomi dan menciptakan lapangan kerja hingga mendorong pendidikan yang kuat dan memerangi penghindaran pajak internasional, menyediakan forum unik dan pusat pengetahuan untuk data dan analisis, pertukaran pengalaman, berbagi praktik terbaik, dan saran tentang kebijakan publik dan penetapan standar internasional.<sup>4</sup> Secara sederhana, peran dari OECD adalah untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dengan mempromosikan prinsip demokrasi dan ekonomi pasar bebas.

OECD merumuskan dan membentuk skema tersebut melalui kerja sama dengan beberapa negara yang dianggap potensial dalam mengimplementasikan program yang telah dibentuk. Indonesia bersama negara seperti Brazil, Tiongkok, India dan Afrika Selatan merupakan mitra kerja (*key partners*) bagi OECD. Salah satu program bagi OECD adalah *enhanced engagement program* (EE-5) yang bersifat komprehensif dan berkelanjutan di tahun 2007. Sementara itu, pada tahun 2012 terjadi transformasi nama EE-5 menjadi *key partner* OECD.

---

<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "PARTISIPASI DPR RI DALAM ACARA THE 6<sup>th</sup> OF THE ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) PARLIAMENTARY DAYS 7-9 FEBRUARI 2018 DI PARIS, REPUBLIK PERANCIS". <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BKSAP-13-3f428aeb8ab74fd68038e0db3055d087.pdf>, diakses pada 24 September 2022.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Organization for Economic Cooperation and Development. "About OECD". <https://www.oecd.org/about/>, diakses pada 24 September 2022.

Salah satu bentuk implementasi program OECD adalah dengan dijalinnya kerja sama dengan Indonesia yakni *Framework of Agreement-FCA* yang berlaku selama 5 tahun (2012-2017), kemudian ditandatanganinya *OECD-Indonesia Joint Work Programme 2017-2018* dan *Agreement between Indonesia and OECD on the Establishment of the OECD Country Office in Indonesia* periode 2018-2023.

Berbagai bentuk kerja sama ini dilakukan karena misi OECD dan Indonesia berada pada garis pokok yang sama. Bagi Indonesia, kerja sama ini memberikan kesempatan untuk mewujudkan dan meningkatkan efektivitas kemajuan kepentingan nasional tanpa perlu melembagakan kerja sama tersebut.<sup>5</sup> Selain itu, kerja sama Indonesia-OECD tidak hanya berdampak pada sektor domestik, namun juga meningkatkan dukungan terhadap posisi Indonesia di berbagai kerja sama seperti Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST).

Selain itu, OECD juga melibatkan pemerintahan dalam negeri di negara yang terlibat program seperti Kementerian Perdagangan RI. Kemendagri memiliki peranan penting dalam Joint Work Programme Indonesia-OECD di tahun 2017-2018 yang terbagi dalam dua sub-bagian.

Program pertama terkait peran OECD dalam mengoptimalkan fasilitas dan pelayanan perdagangan sehingga mampu memaksimalkan keuntungan dalam rantai pasok, termasuk untuk mendukung Indonesia dalam memperbaharui dan meningkatkan kapasitas perdagangan, mengeksplorasi cara agar dapat meningkatkan keterlibatan UKM, serta mengidentifikasi faktor-faktor kebijakan yang penting untuk membantu Indonesia berpartisipasi dalam memperoleh manfaat dari sektor pertanian dan pangan.

Sub program kedua yakni terkait limitasi perdagangan di Indonesia melalui *Service Trade Restrictiveness Index (STRI)* yang menjadi alat bagi pemerintah Indonesia untuk memperoleh informasi terkait hambatan di sektor perdagangan melalui dua instrument yakni *database* peraturan dan indeks restriksi perdagangan jasa. Program ini bersifat komprehensif sehingga mampu mengakomodir hampir seluruh aspek yang terlibat. *Database* ini mencakup sektor *audiovisual, computer, construction, distribution, financial, logistics, professional, telecommunications*, dan *transport*.

Meskipun STRI diperlihatkan mencakup kebutuhan Indonesia, namun terkait proses implementasi program ini masih dalam tahap pertimbangan dan evaluasi khususnya terkait validitas data. Akan tetapi secara keseluruhan, STRI berdampak dan berkontribusi terhadap *benchmark* dalam agenda reformasi domestik Indonesia.

---

<sup>5</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *op.cit.*

## REFERENSI

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “PERUNDINGAN *ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT* (OECD)”.  
<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/apec-oi/organisasi-internasional/oecd>, diakses pada 24 September 2022.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “PARTISIPASI DPR RI DALAM ACARA *THE 6<sup>th</sup> OF THE ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) PARLIAMENTARY DAYS 7-9 FEBRUARI 2018 DI PARIS, REPUBLIK PERANCIS*”.  
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BKSAP-13-3f428aeb8ab74fd68038e0db3055d087.pdf>, diakses pada 24 September 2022.

Organization for Economics Cooperation and Development. “*About OECD*”.  
<https://www.oecd.org/about/>, diakses pada 24 September 2022.

## ***APEC (Asia Pacific Economic Cooperation)***

Benedetta Claryssa

APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) merupakan organisasi ekonomi atau forum ekonomi regional yang didirikan pada tahun 1989 sebagai tanggapan atas meningkatnya saling ketergantungan ekonomi Asia-Pasifik<sup>6</sup> dan munculnya berbagai blok perdagangan regional di dunia seperti Uni Eropa dan NAFTA (North American Free Trade Area).<sup>7</sup> Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia-Pasifik.<sup>8</sup>

APEC memiliki 21 negara anggota yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat kawasan dengan mempromosikan pertumbuhan yang seimbang, inklusif, berkelanjutan, inovatif dan aman dengan cara mempercepat integrasi ekonomi regional. Berikut daftar negara anggota APEC beserta tanggal bergabungnya:<sup>9</sup>

No	Negara Anggota APEC	Tanggal Bergabung
1.	Australia	6-7 November 1989
2.	Brunei Darussalam	6-7 November 1989
3.	Canada	6-7 November 1989
4.	Chile	11-12 November 1994
5.	People's Republic of China	12-14 November 1991
6.	Hong Kong, China	12-14 November 1991
7.	Indonesia	6-7 November 1989
8.	Japan	6-7 November 1989
9.	Republic of Korea	6-7 November 1989
10.	Malaysia	6-7 November 1989
11.	Mexico	17-19 November 1993
12.	New Zealand	6-7 November 1989
13.	Papua New Guinea	17-19 November 1993
14.	Peru	14-15 November 1998
15.	Philippines	6-7 November 1989

---

<sup>6</sup> "About APEC | APEC", *APEC*, 2022, <https://www.apec.org/about-us/about-apec>.

<sup>7</sup> "Asia-Pacific Economic Cooperation | International Organization", *Encyclopedia Britannica*, 2022, <https://www.britannica.com/topic/Asia-Pacific-Economic-Cooperation>.

<sup>8</sup> "Canada And The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)", *GAC*, 2022, [https://www.international.gc.ca/world-monde/international\\_relations-relations\\_internationales/apec/index.aspx?lang=eng](https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/apec/index.aspx?lang=eng).

<sup>9</sup> "About APEC | APEC", *APEC*, 2022, <https://www.apec.org/about-us/about-apec>.

16.	Russia	14-15 November 1998
17.	Singapore	6-7 November 1989
18.	Chinese Taipei	11-12 November 1994
19.	Thailand	6-7 November 1989
20.	United States	6-7 November 1989
21.	Vietnam	14-15 November 1998

Sumber : *apec.org*

APEC memiliki tiga pengamat resmi yaitu *Economic Cooperation Council (PECC)*, *the South Pacific Forum (SPF)*, dan *the secretariat of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.<sup>10</sup>

Sekretariat APEC didirikan pada tahun 1993 yang berpusat di Singapura. Sekretariat APEC menyediakan layanan konsultasi dan logistik serta penelitian dan analisis. Sekretariat APEC mendukung segala bentuk kegiatan yang dilakukan APEC.

Salah satu proses kegiatan APEC adalah proyek peningkatan kapasitas APEC. Proyek peningkatan kapasitas APEC memainkan peran penting dalam mewujudkan tujuan APEC. Proyek peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan keterampilan dan pengetahuan teknologi sehingga dapat memperkuat kesiapan negara anggota untuk mengadopsi inisiatif baru dari pemrosesan bea cukai elektronik hingga reformasi peraturan. Proyek-proyek APEC juga menargetkan bidang kebijakan khusus mulai dari peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah hingga memfasilitasi adopsi teknologi energi terbarukan di wilayah tersebut.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

## REFERENSI

"About APEC | APEC". *APEC*, 2022. <https://www.apec.org/about-us/about-apec>.

"Asia-Pacific Economic Cooperation | International Organization". *Encyclopedia Britannica*, 2022. <https://www.britannica.com/topic/Asia-Pacific-Economic-Cooperation>.

"Canada And The Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)". *GAC*, 2022. [https://www.international.gc.ca/world-monde/international\\_relations-relations\\_internationales/apec/index.aspx?lang=eng](https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/apec/index.aspx?lang=eng).

## OPEC (*Organizations of Petroleum Exporting Countries*)

Ahmad Luthfi

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat telah menetapkan ajaran bahwa Timur Tengah adalah wilayah kunci, penyelamat hidup Mitra. Alasannya tentu saja karena Timur Tengah, atau negara-negara yang berada semenanjung Persia, memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Dari minyak yang dihemat (*demonstrated saves*) sekitar 1,028 miliar barrel, dua pertiganya dikuasai oleh lima negara, yakni Arab Saudi, Irak, bersama Emirat Timur Tengah, Kuwait, dan Iran. Arab Saudi memiliki 25,5 persen penghematan minyak di seluruh dunia, Irak 10,9 persen, Gabungan bersama Emirat Timur Tengah 9,5 persen, Kuwait 9,3 persen dan Iran 8,8 persen.<sup>11</sup>

OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak) adalah sebuah organisasi yang tujuannya adalah untuk mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangkitan minyak, biaya dan hak konsesi dengan perusahaan minyak. OPEC didirikan pada 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Negara-negara pendiri OPEC adalah: Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Venezuela adalah negara pertama yang memulai pembentukan organisasi OPEC dengan mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait, dan Arab Saudi pada tahun 1949.<sup>12</sup> Sejak OPEC dibentuk pada tahun 1960, organisasi beranggotakan 11 negara ini (Aljazair, Arab Saudi, Indonesia, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Bergabung bersama Emirat Timur Tengah, dan Venezuela) telah disalahkan untuk beberapa kesempatan, Yang paling menonjol adalah darurat vitalitas di Tahun 1970-an, yang memuncak pada 1973-1974, terjadi kenaikan empat kali lipat dalam biaya minyak dunia yang sebagian besar disebabkan oleh perilaku kolusi individu OPEC.<sup>13</sup>

Dari tahun 1982 sampai 1985 OPEC berusaha untuk menetapkan standar pembangkitan yang cukup untuk menstabilkan biaya. Upaya ini telah gagal lebih dari sekali karena banyak anggota OPEC menghasilkan melewati jumlah yang telah ditetapkan. Untuk sebagian besar periode ini, Arab Saudi memainkan peran sebagai pembuat ayunan, memotong generasi rumah tangga untuk menahan biaya yang turun. Pada Agustus 1985, Arab Saudi tidak perlu lagi memainkan peran penyesuaian. Mereka akhirnya memperkirakan minyak mereka dengan harga minyak mentah dan pada awal 1986 meningkatkan produksi dari 2 juta barel per hari menjadi 5 juta barel per hari. Harga minyak mentah turun dalam kisaran \$10

---

<sup>11</sup> SATRIA, B. S. (2018). *Peranan OPEC Kaitannya Dalam Fluktuasi Harga Minyak Dunia Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Harga Bbm Dalam Negeri* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN). Hal 1

<sup>12</sup> Dumandi, S. (2020). Modul pembelajaran SMA sejarah kelas XII: organisasi regional dan global. Hal.19

<sup>13</sup> Setyadharma, A. (2006). Apakah Opec Merupakan Kartel?: Pendekatan Kausalitas Granger dalam Kerangka Vector Autoregressive. *KINERJA*, 10(2), hal.89



per barel pada pertengahan 1986 meskipun pada akhir tahun 1986 telah mencapai \$14.

Indonesia bergabung dengan OPEC dalam rangka mengurangi hegemoni perusahaan yang tergabung dalam organisasi ini yang individunya merupakan negara-negara perdagangan besar lainnya. Dalam pendaftaran OPEC, ini digunakan sebagai pertemuan untuk memfasilitasi pendekatan untuk menjamin dukungan iklan yang menguntungkan bagi produsen dan dapat memastikan keinginan negara-negara eksportir.<sup>14</sup>

Indonesia sempat menjadi salah satu negara yang ikut merasakan dampaknya di tengah partisipasi awal hingga beberapa waktu lalu memilih untuk berangkat pertama kali pada tahun 2008. Perubahan pengaturan partisipasi Indonesia dapat dilihat melalui komponen-komponen yang mempengaruhinya, menjadi kondisi spesifik dunia dan kondisi domestik, sehingga akan membentuk pengakuan atau keputusan pemerintah terhadap kondisi tersebut. Selanjutnya pengakuan itu akan menjadi tujuan Indonesia dalam pendaftaran OPEC. Melihat kondisi pemukiman pada saat itu, lebih tepatnya bangsa ini berada pada titik paling rendah dari pembangkitan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa variabel.<sup>15</sup>

Setelah menggelar sidang, Indonesia seperti dibekukan dari partisipasi OPEC, Indonesia resmi masuk kembali sebagai bagian pada 2014 yang diikuti oleh pemilihan Joko Widodo sebagai presiden modern. Pada 30 November 2016, Indonesia kembali menghapus partisipasi OPEC, ini merupakan dampak dari pendekatan OPEC untuk mengurangi produksi minyak Indonesia sebesar 37.000 barel per hari, untuk menghentikan penurunan biaya minyak dunia.

---

<sup>14</sup> ANGGITA, A. A. (2019). *PERUBAHAN KEBIJAKAN INDONESIA PADA KEANGGOTAAN ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES (OPEC) TAHUN 2015-2016* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). Hal 2

<sup>15</sup> *ibid*

## REFERENSI

SATRIA, B. S. (2018). *Peranan OPEC Kaitannya Dalam Fluktuasi Harga Minyak Dunia Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Harga Bbm Dalam Negeri* (Doctoral dissertation, PERPUSTAKAAN). Hal.1

Dumandi, S. (2020). Modul pembelajaran SMA sejarah kelas XII: organisasi regional dan global.

Setyadharma, A. (2006). Apakah Opec Merupakan Kartel?: Pendekatan Kausalitas Granger dalam Kerangka Vector Autoregressive. *KINERJA*, 10(2), 89-102.

ANGGITA, A. A. (2019). *PERUBAHAN KEBIJAKAN INDONESIA PADA KEANGGOTAAN ORGANIZATION OF THE PETROLEUM EXPORTING COUNTRIES (OPEC) TAHUN 2015-2016* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

## ***INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)***

Muhammad Faizul Hafizi

Organisasi Internasional ini tidak asing lagi didengar oleh para akademisi Hubungan Internasional ataupun akademisi Ekonomi, dimana peran organisasi Internasional yang bergerak di bidang ekonomi ini sangatlah penting bagi dunia, selain menjadi Lembaga keuangan dunia, IMF juga menjadi penanggung jawab sistem moneter internasional, sebab itulah pada tulisan ini penulis akan membahas sedikit seluk beluk IMF (*International Monetary Fund*).



**Sumber:** ruangnegeri.com

IMF didirikan bertepatan pada Konferensi Bretton Woods pada Juli 1944, yang dimana awal mula pembahasannya diprakarsai oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt untuk menyelesaikan semua kesulitan yang diakibatkan oleh Perang Dunia II, yang diwaktu bersamaan juga dibentuknya bank dunia atau pada masa itu dinamakan *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD), dimana pada awal beroperasinya IMF hanya beranggotakan sebanyak 29 negara, yang mana pada setiap negara yang tergabung pada organisasi tersebut diwajibkan menyumbang sejumlah dana dengan menggunakan sistem kuota tertentu yang mana dana yang disumbangkan tersebut dipergunakan untuk diberikan kepada negara lain yang sedang mengalami kesulitan atau krisis ekonomi serta negara yang kesulitan dalam mengelola neraca pembayarannya.

Tidak hanya itu IMF juga berperan dalam penyediaan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang sedang mengalami masalah ekonomi ataupun yang berpotensi mengalaminya, hal tersebut IMF bertanggung jawab memberi dukungan keuangan dan bekerja sama dengan negara terutama pemerintah, agar pengeluaran

ataupun pinjaman dana yang diberikan IMF merupakan pengeluaran yang bisa dipertanggung jawabkan, selain itu IMF juga pernah membantu Indonesia pada saat krisis keuangan, yaitu dengan meminjamkan dana dan menstabilkan sektor moneter Indonesia pada tahun 1997-1998, Adapun dengan bantuan dari IMF tersebut Indonesia dapat pulih dari krisis ekonomi yang dialaminya dan bangkit Kembali dari keterpurukan ekonomi tersebut.<sup>16</sup>

Kembali lagi dalam peran IMF dalam mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia menjadi salah satu hal yang menjadikan IMF berhasil dalam menjalankan perannya, krisis ekonomi yang berputar-putar sekitar kurs nilai tukar valas, khususnya dollar AS, yang melambung tinggi jika dihadapkan dengan pendapatan masyarakat dalam rupiah yang tetap, bahkan dalam beberapa hal turun ditambah PHK, padahal harga dari banyak barang naik cukup tinggi, kecuali Sebagian sektor pertanian dan ekspor. Imbas dari kemerosotan nilai tukar rupiah yang tajam secara umum sudah kita ketahui: kesulitan menutup APBN, harga telur/ayam naik, utang luar negeri dalam rupiah melonjak, harga BBM/tarif listrik naik, tarif angkutan naik, perusahaan tutup atau mengurangi produksinya karena tidak bisa menjual barangnya dan beban utang yang tinggi, toko sepi, PHK di mana-mana, investasi menurun karena impor barang modal menjadi mahal, biaya sekolah di luar negeri melonjak. Dampak lain adalah laju inflasi yang tinggi selama beberapa bulan terakhir ini, yang bukan disebabkan karena *imported inflation*, tetapi lebih tepat jika dikatakan *foreign exchange induced inflation* (Inflasi yang diakibatkan devisa).

Masalah ini hanya bisa dipecahkan secara mendasar bila nilai tukar valas bisa diturunkan hingga tingkat yang wajar atau nyata (riil). Dengan demikian roda perekonomian bisa berputar kembali dan harga-harga bisa turun dari tingkat yang tinggi dan terjangkau oleh masyarakat, meskipun tidak kembali pada tingkat sebelum terjadinya krisis moneter.

Namun, penurunan nilai rupiah yang drastis juga membawa pencerahan. Secara umum, impor barang turun signifikan, antara lain impor buah-buahan, perjalanan internasional, dan pengiriman siswa ke luar negeri untuk sekolah. Di sisi lain, jumlah wisatawan asing akan meningkat, dan produk dalam negeri dengan kandungan impor rendah akan menjadi lebih kompetitif, yang akan membantu mengurangi impor dan meningkatkan ekspor secara khusus. Industri berbasis pertanian melihat peningkatan perlindungan industri lokal seiring dengan penurunan nilai tukar rupiah, dan pemilik bisnis dalam negeri berhenti meminjam uang dari luar negeri. Akibatnya, akun saat ini telah meningkat. Petani yang bergantung pada ekspor melihat pendapatan mereka dalam rupiah melonjak

---

<sup>16</sup> Gunawan, A.H., Sri Mulyani I. 1998. "Krisis Ekonomi Indonesia dan Reformasi (Makro) Ekonomi", makalah pada Simposium Kepedulian Universitas Indonesia Terhadap Tatanan Masa Depan Indonesia", Kampus UI, Depok, 30 Maret - 1 April

tajam dalam semalam, sementara harga barang-barang seperti beras, gula, kopi, dan barang-barang lainnya juga meningkat untuk pelanggan domestik.

Sayangnya, ekspor tidak naik seperti yang diharapkan dan justru cenderung sedikit menurun di sektor produk industri. Meskipun petani menerima lebih banyak uang dalam rupiah untuk mengekspor barang, penerimaan ekspor dalam mata uang asing sebagian besar tetap tidak berubah karena pembeli luar negeri menjaga harga tetap rendah karena mereka tahu petani dapat memperoleh keuntungan besar dan karena negara produsen lain juga melihat penurunan nilai tukar mata uang mereka dan dapat menurunkan harga mereka. biaya penjualan dalam mata uang asing. Hal yang sama juga terjadi pada ekspor barang manufaktur, namun dalam hal ini terdapat tantangan tambahan untuk meningkatkan ekspor karena tantangan pembukaan L/C dan kondisi sosial politik yang ambigu yang menyebabkan pelanggan internasional mengalihkan pesannya ke negara lain.

Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, diperkirakan akan ada 7,5 juta rumah tangga miskin pada Oktober 1998, yang memerlukan penerapan jaring pengaman sosial. Karena penurunan tajam nilai tukar rupiah mengakibatkan kesenjangan antara pendapatan yang naik atau turun agak karena kehilangan pekerjaan dan pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat inflasi yang tinggi, biaya akan berkurang jika nilai tukar rupiah dapat dibawa kembali ke nilai sebenarnya. Persyaratan pendanaan jaring pengaman sosial ini dapat dikurangi secara drastis.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Bank Indonesia. 1998. "Financial Crisis in Indonesia", Jakarta, Agustus.

## **REFERENSI**

Gunawan, A.H., Sri Mulyani I. 1998. "Krisis Ekonomi Indonesia dan Reformasi (Makro) Ekonomi", makalah pada Simposium Kepedulian Universitas Indonesia.

Terhadap Tatanan Masa Depan Indonesia", Kampus UI, Depok, 30 Maret - 1 April. Bank Indonesia. 1998. "Financial Crisis in Indonesia", Jakarta, August.